

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang memanfaatkan bidang pertanian sebagai salah satu sektor utama ekonomi negara. Sektor pertanian berperan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan produksi bahan pangan. Usaha peningkatan produksi terus dikembangkan oleh pemerintah agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Usaha peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan peningkatan produktifitas, peningkatan intensitas tanaman, dan penambahan luas lahan, yang ditunjang dengan adanya pengembangan dan penyediaan prasarana pertanian seperti irigasi.

Prasarana produksi seperti irigasi membutuhkan pengelolaan dan pengembangan serta perawatan bersama baik dari masyarakat sebagai pengguna dan pemerintah sebagai pengatur kebijakan serta penanggung jawab kegiatan (Juhana *et al.*, 2016). Penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi dibagi berdasarkan kriteria dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Mengenai Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (2015), dimana menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sistem irigasi dengan ketentuan mengacu pada status daerah irigasi. Pemerintah pusat mengatur dan mengelola sistem irigasi dengan luas > 3000 ha, pemerintah provinsi mengatur dan mengelola sistem irigasi dengan luas 1000 ha - 3000 ha, dan pemerintah kabupaten/kota mengatur dan mengelola daerah irigasi dengan luas < 1000 ha.

Pengelolaan serta pengembangan jaringan irigasi ini bertujuan agar air yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kegiatan pertanian. Pengelolaan

jaringan irigasi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada demi keberlangsungan kegiatan terutama di bidang pertanian. Pengairan irigasi menjadi salah satu sarana penting yang akan menentukan peningkatan atau penurunan hasil produksi (Hidayat, 2019).

Sektor pertanian akan bergantung pada irigasi agar hasil produksi meningkat. Irigasi menjadi salah satu prasarana pertanian yang akan mempengaruhi produktifitas lahan (Sari *et al.*, 2022). Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 menjelaskan bahwasanya sistem irigasi menjadi salah satu pendukung dari keberhasilan sektor unggulan nasional, khususnya dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, irigasi sebagai sumber bagi ketersediaan air dalam pengairan pertanian (Afwan, 2019).

Penggunaan air irigasi ini harus dilakukan secara efektif dan efisien supaya kebutuhan air pada tanaman dapat tercukupi. Hal ini seperti terdapat pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, menjelaskan bahwasanya dalam melakukan pengembangan dan pengaturan irigasi dapat dilaksanakan oleh petani itu sendiri maupun pemerintah bergantung pada ketentuannya. Pengembangan dan pengaturan ini sebagai bentuk usaha pertanian dalam memanfaatkan peranan air bagi kebutuhan tanaman. Peranan air pada budidaya pertanian sangat diperlukan untuk memperoleh efektifitas hasil selama proses pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, dan pengendalian gulma agar dapat memperoleh hasil panen yang lebih maksimal. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan peraturan menteri PUPR mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menyatakan bahwasannya evaluasi kinerja sistem irigasi dilaksanakan agar memahami sejauh mana kemampuan sistem irigasi dalam beroperasi (Fachrie *et al.*, 2019) Irigasi menjadi penyokong dalam kemajuan pembangunan pertanian serta strategi

pemerintah dalam bentuk mempertahankan swasembada pangan. Irigasi diperlukan dalam kegiatan pertanian, terutama di daerah yang sebagian penduduknya bermata pencarian petani seperti di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Kecamatan Bayang memiliki luas lahan persawahan dengan pengairan irigasi sebesar 1.628,19 ha dan salah satunya di Kenagarian Kapelgam dengan luas lahan persawahan sebesar 182 ha. Luas lahan yang sebesar ini memungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai penunjang kebutuhan pokok dan penghidupan masyarakat. Daerah irigasi yang ada di Nagari Kapelgam yaitu Daerah Irigasi Banda Sago, yang dimana menurut Bapedalitbang Kab Pessel 2022, jaringan irigasi ini sempat mengalami kerusakan sejak di bangun pada tahun 1990 berupa paliritan, kemudian pada tahun 2022 dilakukan rehabilitasi pada daerah irigasi yang dibangun menjadi bangunan permanen. Daerah irigasi yang baru dibangun ini belum dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya untuk itu perlu dilakukan evaluasi kinerja daerah irigasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan irigasi dalam beroperasi. Evaluasi kinerja irigasi ini yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Direktorat Jenderal SDA - Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (2015), yang berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pengelolaan Aset Dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI).

Mengacu pada uraian diatas maka diperlukan penelitian mengenai **“Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi (DI) Banda Sago Kenagarian Kapelgam (Kapencong-Lubuk Gambia) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”** penelitian ini akan dapat membantu dalam menganalisa keadaan dari irigasi pada daerah yang diteliti.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem irigasi pada Daerah Irigasi Banda Sago di Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kinerja keseluruhan sistem irigasi di Daerah Irigasi (DI) Banda Sago berdasarkan metode evaluasi kinerja sistem irigasi sesuai JUKLAK PAKSI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berguna sebagai bentuk langkah lanjutan seperti perbaikan, perawatan dan pemeliharaan dari jaringan irigasi yang ada serta memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami dan mengetahui pentingnya pengelolaan irigasi yang baik agar tercapai peningkatan produktifitas pertanian yang ada di daerah tersebut.

1.5 Hipotesis

Kinerja sistem irigasi secara keseluruhan di DI Banda Sago berada dalam kategori kinerja kurang baik, yang memerlukan peningkatan pada aspek pendukung agar berkelanjutan dan efisien.

